

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI
TAHUN 2024



KATAPENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dapat terselesaikan pada waktunya.

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan kewenangannya, sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan selama tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Selain itu diharapkan Laporan Tahunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kegiatan di tahun mendatang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bagian yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tahunan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan tahunan yang akan datang.

Jambi, Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra. Nella Ervina MM.Agr, ME
NIP. 19740329 199303 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai salah satu akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan tugas pada bidang Pendapatan Pajak Daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Penyusunan Laporan Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Walikota Jambi dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi-Informasi yaitu sebagai berikut :

- (1) Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada bidang Keuangan;
- (2) Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Walikota Jambi.

1. 2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

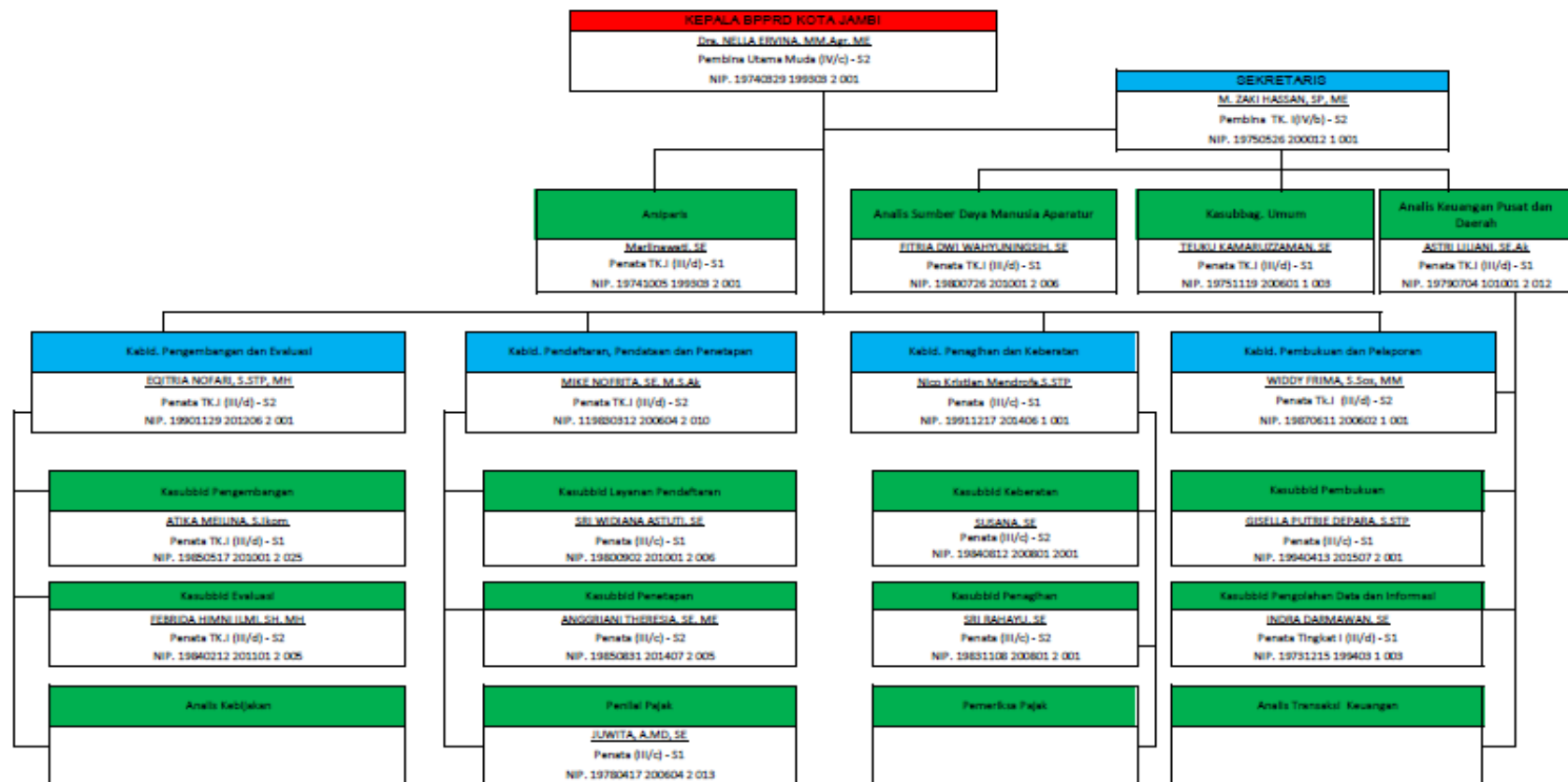
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2008 nomor 07);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
11. Keputusan Walikota Jambi Nomor 362 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPFRD



Jambi, 2024
KEPALA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

ttd

Drs. NELLA IRVINA, MM, Agr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199503 2 001

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur ;

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,

Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;
2. Penilai Pajak ;
3. Sub Bidang Penetapan ;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

- 1.Sub Bidang Penagihan ;
- 2.Sub Bidang Keberatan ;
- 3.Pemeriksa Pajak ;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan ;
2. Analis Transaksi Keuangan ;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan ;
2. Analis Kebijakan ;
3. Sub Bidang Evaluasi ;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi

PEGAWAI	POSISI PER 31-12-2023	TAMBAH	KURANG	POSISI PER 31-12-2023
Pejabat Struktural	15	-	-	15
JFT	3	-	-	3
Fungsional	1			1
Staf	47	1	1	47
Staf Non PNS	36	-	-	36
Satpam	6	-	1	5
Cleaning Service	4	-	1	3
Jumlah	112	1	4	110

1.4 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

BARANG IVENTARIS												
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Laptop	2006	-	-	Komputer	2010	-	-	Printer	2006	1	Kurang Baik
		2007	-	-		2011	-	-		2007	2	Kurang Baik
		2010	1	Kurang Baik		2012	1	Kurang Baik		2010	-	-
		2011	2	Kurang Baik		2013	-	-		2011	-	-
		2012	1	Kurang Baik		2014	1	Kurang Baik		2012	-	-
		2013	5	Kurang Baik		2015	18	Kurang Baik		2013	1	Kurang Baik
		2014	9	Kurang Baik		2016	9	Kurang Baik		2014	5	Kurang Baik
		2015	3	Kurang Baik		2017	14	Kurang Baik		2015	3	Kurang Baik
		2016	2	Baik		2018	2	Baik		2016	9	Kurang Baik
		2017	4	Baik		2019	6	Baik		2017	8	Baik
		2018	2	Baik		2020	4	Baik		2018	10	Baik
		2019	4	Baik		2021	4	Baik		2019	9	Baik
		2020	-	-		2022	3	Baik		2020	7	Baik
		2021	1	Baik		2021	-	-		2021	-	-
		2022	-	-		2022	7	Baik		2022	4	MPP
		2023	2	Baik		2023	7	Baik		2023	7	Baik
		2024	8	Baik		2024	4	Baik		2024	10	Baik
	Jumlah		44				80				76	

Keterangan	Laptop	Komputer	Printer	Keterangan	Laptop	Komputer	Printer
Jumlah	44	80	76	Kurang Baik	21	43	21
Baik	23	37	55	Rusak Berat	9	11	18
Kurang Baik	21	43	21	Servis Ringan	12	32	3

Laptop Kurang Baik sebanyak 21 Pembelian Tahun 2010 s.d 2015

Komputer Kurang Baik sebanyak 43 unit Pembelian Tahun 2012 s.d 2017

Printer Kurang Baik sebanyak 21 Pembelian Tahun 2006 s.d 2015

BARANG IVENTARIS								
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	AC	2006	4	Kurang Baik	CCTV	2006	-	-
		2007	-	-		2007	-	-
		2010	-			2010		
		2011	1	Kurang Baik		2011		
		2012	4	Kurang Baik		2012		
		2013	3	Kurang Baik		2013		
		2014	5	Kurang Baik		2014		
		2015	2	Kurang Baik		2015		
		2016	4	Baik		2016		
		2017	8	Baik		2017	1	Kurang Baik
		2018	7	Baik		2018	-	
		2019	1	Baik		2019	1	Kurang Baik
		2020	-	-		2020	-	
		2021	4	Baik		2021	-	
		2022	1	Baik		2022	1	
		2023	-	-		2023	-	
		2024	15	Baik		2024	-	
	Jumlah		59				3	

Keterangan	AC	CCTV
Jumlah	59	3
Baik	40	1
Kurang Baik	19	2

Keterangan	AC	CCTV
Kurang Baik	19	2
Rusak Berat	6	0
Servis Ringan	13	2

AC Kurang Baik Sebanyak 19 Unit Pembelian Tahun 2006 s/d 2015
CCTV Kurag Baik Sebanyak 2 Unit Pembelian 2019 dan 2017

BARANG IVENTARIS												
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Roda 6	2013	1	Baik	Roda 4	2005	1	Kurang Baik	Roda 2	2010	1	1 Lelang
						2014	2	Baik		2013	3	1 Kurang Baik, 2 Lelang
						2015	2	Baik		2014	5	3 Kurang Baik, 2 Lelang
						2016	2	1 Lelang		2019	7	
						2017	1	Baik		2022	2	
						2019	1	Baik				
						2021	2	Baik				
						2022	6	Baik				
	Jumlah		1				17				18	

Keterangan	Roda 6	Roda 4	Roda 2
Jumlah	1	17	18
Baik	1	15	7
Kurang Baik	0	1	4
Akan di lelang	0	1	5

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan

Maksud

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2024 adalah untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu dan membantu perkiraan peluang-peluang terhadap aktivitas dan keputusan manajerial Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2024.

Tujuan

1. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung, ruang, dan peralatan kerja.
2. Meningkatnya sistem perencanaan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Menguraikan tentang Latar belakang, dasar hukum, gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aset Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Indikator dan target indicator, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah, target indikator program dan kegiatan program tahun 2023, dan Perjanjian Kerja kepala OPD tahun 2024.

BAB III REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2023

Menguraikan tentang strategi dan kebijakan pendapatan, permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan, target dan realisasi belanja langsung dan belanja langsung.

BAB IV CAPAIAN DAN HASIL

Menguraikan tentang realisasi indikator kinerja maupun anggaran, menjelaskan hal-hal yang menjadi prestasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang penutupan Laporan Tahunan yang menggambarkan hasil kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dirangkum dalam kesimpulan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Indikator dan Target Indikator

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja.

Indikator-indikator yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			2023		2024	
			Target	Realsasi	Target	Realsasi
1.	Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9%	2,67%	9%	1,43%
2.	Sasaran : Meningatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Indikator Sasaran : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	370.000.000.000	325.296.715.240	345.000.000.000	330.056.169.249

2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan kebijakan pembangunan.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Keterkaitan Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Dengan RPD Kota Jambi Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumusan	Target sasaran Hasil Pembangunan			
							2023		2024	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Meningkatnya PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	370.000.000.000	325.296.715.240	345.000.000.000	330.056.169.249

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran strategis sesuai dengan kurun waktu 2024-2026, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memilih strategi melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan meliputi :

I. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka ditentukan beberapa strategi

Tabel 2.3
Tujuan, sasaran Strategi dan Kebijakan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

Visi Kota Jambi: Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya			
Misi 4:Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan			
Tujuan	sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Melaksanakan sosialisasi /penyuluhan terkait regulasi pajak daerah. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi. 4. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah. 5. Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

2.4 Target Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2024

Target indikator program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target indikator program dan Kegiatan Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume
(1)	(2)		(4)	(5)
I	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	345.000.000.000
	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	9%
	Sub Kegiatan:			
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan
	4	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen

	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
II	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%
	Kegiatan:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	A
	Sub Kegiatan:			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Sub Kegiatan:			
	1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan
	Kegiatan:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	57,00
	Sub Kegiatan:			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1 Paket
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang

	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
	Kegiatan:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%
	Sub Kegiatan:			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Kegiatan:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Sub Kegiatan:			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Sub Kegiatan			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	37 Unit
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101 Unit
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit

2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala OPDTahun 2024

Perjanjian Kinerja suatu hal penting bagi Organisasi Perangkat Daerah karena merupakan wujud dari komitmen anggota organisasi terhadap tanggung jawabnya pada tahun berjalan untuk pencapaian tujuan organisasi. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah juga merupakan komitmen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kepada Walikota Jambi, dan sekaligus sebagai komitmen Walikota Jambi terhadap masyarakat Kota Jambi.

Dengan adanya perjanjian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 yang sudah diligalisasi oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan Walikota Jambi, maka Kepala Badan akan fokus.

TABEL 2.5
CAKUPAN PERJANJIAN BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

No	SasaranStrategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pajak	345.000.000.000
		Retribusi	30.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.590.428.861	71,67%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.114.624.139	28,33%
	Jumlah	35.705.053.000	100%

BAB III

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Pendapatan

Presentase pertumbuhan pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kinerja pendapatan daerah pada tahun tertentu dengan pertumbuhan positif atau negatif. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai pendapatan asli daerah yang dikelola yaitu pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dengan demikian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menghitung presentase pendapatan asli daerah.

Tahun 2024 anggaran pendapatan BPPRD sebelum perubahan pajak daerah sebesar Rp. 390.000.000.000 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa panggung billboard) sebesar Rp. 30.000.000,- setelah perubahan pajak daerah sebesar Rp. 345.000.000.000,- Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pajak Reklame	9,600,000,000	9,981,416,423	103.97%
2.	Pajak Air Tanah	950,000,000	1,474,356,149	155.20%
3.	PBBP2	33,000,000,000	32,549,033,743	98.63%
4.	BPHTB	82,000,000,000	76,791,486,872	93.65%
5.	PBJT	219,450,000,000	209,259,876,062	95.36%
	Total	345,000,000,000	330,056,169,249	95.67%

3.2 Belanja

Tahun 2024 anggaran belanja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Jambi sebesar Rp. 35.705.053.000,-.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan pada berbagai program –program dan kegiatan - kegiatan sebagai pendukung utama maupun bukan pendukung utama dalam pencapaian target Laporan Kinerja indikator kinerja per sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Anggaran belanja yang dialokasikan tersebut terdiri dari anggaran belanja operasi dan belanja modal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebesar sebagai berikut :

1. Belanja operasi semula sebesar Rp. 37.843.675.423-, setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) menjadi sebesar Rp. 33.932.813.770,-.
2. Belanja Modal semula sebesar Rp. 1.908.257.577,- setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) menjadi sebesar Rp. 1.772.239.230,- .

3.2.1 Belanja dan Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada table 3.2.1 dibawah, sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Belanja Operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisai (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	33,932,813,770.00	29,640,203,188.51	87.35%
	Belanja Pegawai	20,524,795,134.00	18,559,834,641.00	90.43%
	Belanja Barang dan Jasa	13,408,018,636.00	11,080,368,547.51	82.64%
2	Belanja Modal	1,772,239,230.00	1,746,744,000.00	98.56%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,772,239,230.00	1,746,744,000.00	98.56%
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-	-	0.00%
Total		35,705,053,000.00	31,386,947,188.51	87.91%

3.2.2 Belanja dan Realisasi

Anggaran belanja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun anggaran 2024 terdiri dari sebagai berikut Tabel

Tabel. 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,590,428,861.00	22,974,769,667.51	89.78%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2,280,245.00	1,803,275.00	79.08%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,361,970.00	976,000.00	71.66%
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	918,275.00	827,275.00	90.09%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,642,260,311.00	18,651,051,821.00	90.35%
3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	20,321,115,134.00	18,356,154,641.00	90.33%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	218,483,977.00	216,152,819.00	98.93%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	102,661,200.00	78,744,361.00	76.70%

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,579,892,861.00	2,429,237,894.00	94.16%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42,960,854.00	36,798,100.00	85.65%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,795,802,707.00	1,752,426,480.00	97.58%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	43,989,300.00	33,205,200.00	75.48%
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33,300,000.00	22,212,450.00	66.70%
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,840,000.00	2,680,000.00	69.79%
14	Fasilitasi kunjungan tamu	60,000,000.00	32,110,000.00	53.52%
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	600,000,000.00	549,805,664.00	91.63%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634,040,000.00	581,290,372.00	91.68%
16	Penyediaan jasa surat menyurat	58,040,000.00	58,040,000.00	100.00%
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	576,000,000.00	523,250,372.00	90.84%
6	Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,282,433,444.00	937,815,586.51	73.13%
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	654,559,632.00	354,984,549.00	54.23%
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	79,612,780.00	76,118,940.00	95.61%
20	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	548,261,032.00	506,712,097.51	92.42%
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,114,624,139.00	8,412,177,521.00	83.17%
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,114,624,139.00	8,412,177,521.00	83.17%
21	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	80,688,625.00	57,769,070.00	71.60%
22	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	165,780,650.00	140,535,100.00	84.77%
23	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	954,724,882.00	855,861,440.00	89.64%
24	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1,151,886,244.00	925,841,500.00	80.38%
25	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	1,976,775,199.00	1,693,280,001.00	85.66%
26	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1,155,616,229.00	1,008,063,330.00	87.23%
27	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1,914,053,894.00	1,596,637,080.00	83.42%
28	Penetapan wajib pajak daerah	293,608,829.00	197,308,340.00	67.20%
29	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	435,047,078.00	387,423,480.00	89.05%
20	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	103,563,519.00	103,295,500.00	99.74%
31	Penagihan pajak daerah	1,034,400,900.00	952,099,900.00	92.04%
32	Penyelesaian keberatan pajak daerah	206,339,610.00	98,847,925.00	47.91%
33	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	464,967,060.00	295,561,380.00	63.57%
34	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	177,171,420.00	99,653,475.00	56.25%
J U M L A H		35,705,053,000.00	1,386,947,188.51	87.91%

BAB IV

CAPAIAN DAN HASIL

4.1 Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran

Realisasi Indikator Kinerja meliputi Indikator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang mengacu pada sasaran RPJMD, Indikator tujuan dan indikator sasaran dan realisasi kegiatan tahun 2024. (sebagaimana tabel terlampir).

Realisasi Anggaran

Tabel 4.1
Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran
Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOMENDASI ATAS LKPJ TAHUN 2024	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN 2024
							Kinerja	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Urusan Keuangan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	1	Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	25.590.428.861	B	89,78%	22.974.769.667,51				
1			2	Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai AKIP	A	2.280.245	79,08	A	1.803.275				
1			3	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.361.970	3 Dokumen	71,66%	976.000				
2			4	Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1 Laporan	918.275	1 Laporan	90,09%	827.275				
2			5	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.642.260.311	100%	90,35%	18.651.051.821				

3			6	Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Org	20.321.115.134	65 Org	90,33%	18.356.154.641				
4					Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	218.483.977	2 Dok	98,93%	216.152.819				
5					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Junlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran	2 Lap	102.661.200	2 Lap	76,70%	78.744.361				
3					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	55,5	449.522.000		83,10%	373.570.719				
6					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	90.150.000	1 Paket	98,66%	88,940,000				
7					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Org	59.372.000	11 Org	42,99%	25.522,000	Tidak tersedianya jadwal diklat PPNS Pajak	Mengupayakan diklat PPNS pajak		
8					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 Org	300.000.000	25 Org	86,37%	259.108.719				
4					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.579.892.861	100.00%	94,16%	2.429.237.894				
9					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang disediakan	2 paket	42.960.854	2 paket	85,65%	36.798.100				
10					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	4 Paket	1.795.802.707	6 Paket	97,58%	1.752.426.480				

						disediakan									
11					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 Paket	43.989.300	1 paket	75,48%	33.205.200				
12					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	33.300.000	2 paket	66,70%	22.212.450				
13					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	3.840.000	1 dok	69,79%	2.680.000				
14					Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Lap	60.000.000	4 Lap	53,52%	32.110.000	Belanja sesuai kebutuhan rapat	Akan menghitung kembali kebutuhan rapat		
15					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	600.000.000	4 Lap	91,63%	549.805.664				
5					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	634.040.000	100.00%	91,68%	581.290.372				
16					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	58.040.000	4 Lap	100%	58.040.000				
17					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	576.000.000	4 Lap	90,84%	523.250.372				
6					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.282.433.444	83.33%	73,13%	937.815.586,51				

18					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 Unit	654.559.632	37 unit	54,23%	354.984.549	adanya 2 kendaraan dinas yang diajukan untuk dilakukan lelang sehingga pembayaran bahan bakar minyak tidak dilaksanakan	anggaran akan disesuaikan dengan pemakaian		
19					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	101 Unit	79.612.780	90 unit	95,61%	76.118.940				
20					Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	548.261.032	2 Unit	92,42%	506.712.097,51				
II					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	345,000,000,000	10.114.624.139	325,296,715,240	83,17%	8.412.177.521				
1					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	9%	10.114.624.139		83,71%	8.412.177.521				
1					Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pajak daerah	2 Dok	80.688.625	2 Dok	71,60%	57.769.070			(1) BPPRD harus segera melakukan Penagihan terhadap piutang pajak daerah dan retribusi daerah untuk PAD kota jambi. (2) BPPRD Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi harus bersinergi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	(1) BPPRD telah berupaya maksimal penagihan dengan melakukan optimalisasi pajak daerah. (2) BPPRD dan BPKAD telah melakukan sinergi dan berkoordinasi dengan provinsi terkait database dan pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKb

2					Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah serta pengembangan kebijakan pajak daerah	1 Dok	165.780.650	1 dok	84,77%	140.535.100				
3					Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 lap	954.724.882	6 lap	89,64%	855.861.440				
4					Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	11 unit	1.151.886.244	11 unit	80,38%	925.841.500				
5					Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 lap	1.976.775.199	12 lap	85,66%	1.693.280.001				
6					Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12 lap	1.155.616.229	12 lap	87,23%	1.008.063.330				
7					Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	1.914.053.894	13.640 Objek pajak	83,42%	1.596.637.080				
8					Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	33.000 Dok	293.608.829	33.000 dok	67,20%	197.308.340	Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah	Akan menyesuaikan kembali belanja perjalanan dinas dalam daerah		
9					Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	30.768 Layanan	435.047.078	30.768 layanan	89,05%	387.423.480				
10					Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	33.000 Dok	103.563.519	33.000 dok	99,74%	103.295.500				

11					Penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	3 Dok	1.034.400.900	3 dok	92,04%	952.099.900				
12					Penyelesaian keberatan pajak	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	1 Dok	206.339.610	1 dok	47,91%	98.847.925	Banyaknya penelitian atas pengajuan keberatan yang dilaksanakan di kantor sehingga mengurangi perjalanan dinas dalam daera	Menghitung kembali belanja perjalanan dinas dalam daerah		
13					Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dok	464.967.060	2 dok	63,57%	295.561.380	Tingkat kepatuhan wajib pajak reklame mulai meningkat sehingga pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk penertiban reklame berkurang	Menghitung kembali belanja perjalanan dinas dalam daerah		
14					Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan hail pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4 Lap	177.171.420	12 lap	56,25%	99.653.475	Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah	Akan menyesuaikan kembali belanja perjalanan dinas dalam daerah		
J U M L A H								35.705.053.000			31.386.947.188,51				

PRESTASI BPPRD

1. Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan atas Dukungan dalam Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jambi.
2. BPPRD Meraih Peringkat ke Tiga Kategori Inovasi Pelayanan Publik LID V - 2024 atas Inovasi e-SPPT PBB.
3. BPPRD Meraih BPPRD Meraih Juara Harapan1 manajemen Kepegawaian Terbaik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini dibuat bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Laporan Tahunan SKPD Tahun 2024 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk kemajuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan perpajakan sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat mewujudkan Visi dan Misinya.
2. Memperbaiki lingkungan kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi supaya rapi dan teratur;
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup.

Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas tugas dan fungsinya.

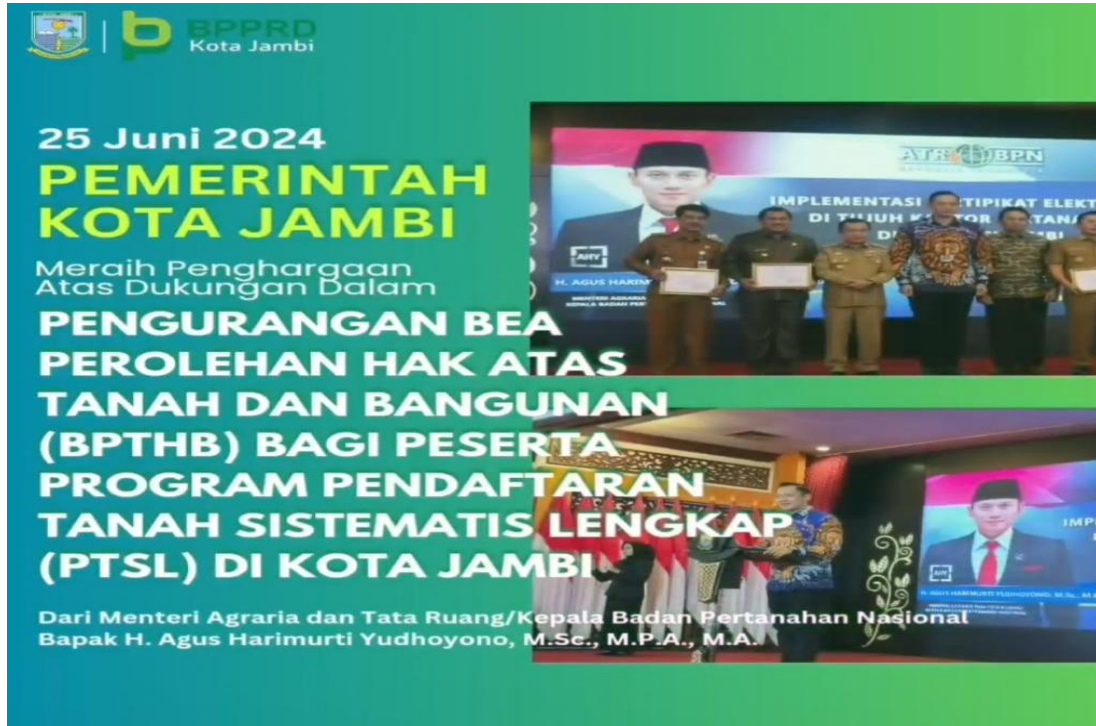
Jambi, Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra. Nella Ervina, MM. Agr
NIP. 19740329 199303 2 001

FOTO PENGHARGAAN

- Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan atas Dukungan dalam Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Jambi.



- BPPRD Meraih Peringkat ke Tiga Kategori Inovasi Pelayanan Publik LID V -2024 atas inovasi e-SPPT PBB.



- BPPRD Meraih BPPRD Meraih Juara Harapan 1 manajemen Kepegawaian Terbaik

